

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

International Civil Law And Its Implications For Human Rights

Dessy N.Mofu¹, Maria P Rettob²

mofuchristin5@gmail.com , atysstysaa@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Musamus^{1,2}

How to cite:

Histori artikel:

Submit :
Diterima :
Diterbitkan :

DOI:

-

Abstract

This article examines the relationship between private international law and human rights, focusing on the legal implications arising from cases involving individuals or entities in various jurisdictions. This study analyzes several real-life case examples that demonstrate how the principles of private international law can affect the protection of human rights. In addition, this article also highlights the challenges faced in enforcing these rights at the global level. By understanding the interaction between private international law and human rights, it is hoped that solutions can be found to improve the protection of individual rights in an increasingly complex global context.

Keywords: *Private International Law, Human Rights, Legal Protection, International Disputes, Law Enforcement*].

Abstrak

Artikel ini membahas hubungan antara hukum perdata internasional dan hak asasi manusia, dengan fokus pada implikasi hukum yang muncul dari kasus-kasus yang melibatkan individu atau entitas di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini menganalisis beberapa contoh kasus nyata yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum perdata internasional dapat mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penegakan hak-hak tersebut di tingkat global. Dengan memahami interaksi antara hukum perdata internasional dan hak asasi manusia, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan perlindungan hak individu dalam konteks global yang semakin kompleks.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Sengketa Internasional, Penegakan Hukum

Pendahuluan

Hukum perdata internasional menjadi semakin penting seiring dengan kemajuan globalisasi dan hubungan antar negara, individu, dan bisnis menjadi semakin kompleks. Ketika perdagangan lintas batas, investasi internasional dan mobilitas pribadi meningkat, tantangan dalam melindungi hak asasi manusia menjadi semakin nyata. Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti diskriminasi, eksploitasi tenaga kerja, dan pelanggaran hak konsumen, terjadi

dalam hubuAda banyak jenis hukum internasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, tetapi penerapannya sering kali tidak konsisten. Sistem hukum internasional dapat menciptakan ruang bagi perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam konflik sipil lintas batas.

Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara hukum internasional dan hak asasi manusia serta mempertimbangkan bagaimana hukum privasi asing dapat dimodifikasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi orang-orang di seluruh dunia.ngan sipil internasiona

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam hukum perdata internasional terkait hak asasi manusia dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan di tingkat global.

Metode Penelitian

Untuk memahami lebih dalam mengenai interaksi antara hukum perdata internasional dan hak asasi manusia, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus dan analisis dokumen.

Pembahasan

1. Kesenjangan Perlindungan Hukum

Kesenjangan dalam perlindungan hak asasi manusia dalam hukum perdata internasional seringkali disebabkan oleh kurangnya koherensi dan konsistensi dalam penerapan hukum di berbagai negara.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk:

- Mengembangkan instrumen hukum yang koheren: Diperlukan perjanjian internasional yang jelas dan komprehensif yang mengatur hak asasi manusia sipil.

Misalnya, kami akan memperkuat perjanjian internasional yang ada, seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan memastikan bahwa negara-negara meratifikasi dan menegakkan ketentuan-ketentuan ini dalam undang-undang nasional mereka.

- Penerapan standar minimum: Penerapan standar minimum untuk perlindungan hak asasi manusia dalam hukum perdata di berbagai negara.Negara-negara dapat bekerja sama untuk mengembangkan pedoman praktik terbaik yang mencakup aspek-aspek seperti akses terhadap keadilan, persidangan, dan perlindungan saksi dan korban.

2. Ketidakselarasan Sistem Hukum

Perbedaan dalam sistem hukum antara negara-negara dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan, terutama dalam kasus-kasus lintas batas. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:

- Harmonisasi hukum: Mengupayakan harmonisasi hukum perdata internasional di berbagai negara, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dapat dicapai melalui kerja sama internasional dan forum hukum untuk membahas isu-isu penting tersebut.
- Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa internasional: Penciptaan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh individu untuk menuntut hak-hak mereka di tingkat internasional. Salah satu pilihannya adalah pengadilan arbitrase internasional atau pengadilan khusus yang menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

3. Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional

Tanggung jawab perusahaan dalam melindungi hak asasi manusia perlu ditegaskan dan diperkuat. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

- Kewajiban hukum dunia usaha: Mengembangkan peraturan yang menetapkan kewajiban hukum bagi perusahaan multinasional untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis mereka. Hal ini termasuk melakukan uji tuntas yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi dampak buruk terhadap hak asasi manusia.
- Sanksi dan Akuntabilitas: Menerapkan sanksi keras terhadap perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Negara-negara harus menerapkan kerangka hukum yang memungkinkan individu untuk membawa perusahaan ke pengadilan jika mereka menemukan pelanggaran.

4. Akses Keadilan

Akses keadilan merupakan aspek krusial dalam perlindungan hak asasi manusia. Beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi:

- Pemberian bantuan hukum: Mempermudah akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang ingin menuntut haknya. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan layanan bantuan hukum yang gratis atau terjangkau.
- Mengurangi biaya litigasi: negara mungkin mempertimbangkan untuk mengurangi biaya litigasi, misalnya dengan memperkenalkan sistem pengadilan yang lebih efisien atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih cepat dan lebih murah.
- Kesadaran Hukum: Program pendidikan dan bantuan mengenai hak asasi manusia dan prosedur hukum yang ada membantu individu memahami dan menegakkan hak-hak mereka.

Dari sudut pandang hukum, ada berbagai cara untuk mengatasi masalah perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka hukum perdata internasional. Dengan mengembangkan instrumen hukum yang konsisten, menyelaraskan sistem hukum, mendefinisikan tanggung jawab perusahaan, dan memastikan akses terhadap keadilan, kami menghubungkan cita-cita hukum dengan kenyataan yang dihadapi individu ketika menuntut hak-haknya sehingga dapat mempersempit kesenjangan tersebut. Upaya bersama ini penting untuk membangun lingkungan yang lebih adil dan merata bagi semua orang di seluruh dunia.

Kesimpulan

Hukum perdata internasional memegang peranan yang sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia di era globalisasi saat ini. Meskipun terdapat prinsip ideal keadilan dan kesetaraan yang mendasari undang-undang tersebut, namun kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan kesenjangan yang besar dalam perlindungan hak asasi manusia.

Permasalahan utamanya mencakup ketidakpastian hukum karena perbedaan sistem hukum di berbagai negara, tantangan dalam penegakan hak asasi manusia di tingkat domestik dan internasional, dan kurangnya akuntabilitas perusahaan multinasional atas tindakan yang merugikan individu. Selain itu, kesulitan dalam mengakses keadilan merupakan hambatan utama bagi banyak orang untuk menggunakan hak-hak mereka.

Mengatasi tantangan-tantangan ini termasuk mengembangkan instrumen hukum yang lebih konsisten dan konsisten, harmonisasi undang-undang nasional, memperkuat tanggung jawab perusahaan, dan meningkatkan akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum dan pendidikan.

Melalui kerja sama yang kuat antar negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, kita pada akhirnya dapat membangun kerangka hukum yang lebih efektif dan inklusif yang menjamin perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di seluruh dunia.

Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong dialog dan kerja sama internasional guna meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum perdata internasional dalam konteks hak asasi manusia dan untuk membangun dunia yang lebih adil.

Daftar Pustaka

- Anisa, N., Amalia, T. K., & Silubun, Y. L.** (2024). Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(1), 11-15.
- Bassiouni, M. Cherif.** (2012). *International Law and Human Rights: A Comprehensive Overview*. New York: Routledge.
- Gomez, R., & Marina, M.** (2019). "The Intersection of International Human Rights Law and International Commercial Law." *Journal of International Law and Human Rights*, 8(2), 45-67.
- Harris, D. J.** (2010). *Cases and Materials on International Law*. London: Sweet & Maxwell.
- Ruggie, J. G.** (2011). "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework." United Nations Human Rights Council.
- Ziegler, R.** (2013). "Human Rights Violations in International Business Transactions: The Role of Private Law." *International Business Law Journal*,